Metode Resiliensi Pada Warga Binaan Perempuan (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Palu)

Resilience Methods for Female Inmates (Case Study of Class III Women's Penitentiary in Palu)

Ayu Iman Sari^{1*} | Maisa² | Imam Basofi Usman³

¹Mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palu

^{2,3}Dosen Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palu

✉ ayuimansari@gmail.com

Abstrak: Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisa metode resiliensi pada warga binaan perempuan di lembaga pemasyarakatan perempuan kelas III Palu dan untuk mengetahui dan menganalisa kendala yang dihadapi lembaga pemasyarakatan perempuan kelas III Palu dalam pelaksanaan pembinaan metode resiliensi pada warga binaan Perempuan. Metode Penelitian menggunakan penelitian hukum empiris yang menggunakan data primer dan data sekunder yang kemudian dipresentasikan dalam bentuk pola berpikir induktif yaitu dari hal yang bersifat khusus menuju ke hal yang bersifat umum. Hasil penelitian menemukan bahwa pelaksanaan pembinaan melalui metode resiliensi pada narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan kelas III Palu bertujuan untuk membantu narapidana dalam mengembangkan ketahanan mental, emosional, dan sosial dalam menghadapi berbagai tantangan selama masa hukuman warga binaan. Adapun kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Palu dalam pelaksanaan pembinaan metode resiliensi pada warga binaan perempuan, yaitu: a) Keterbatasan sumber daya manusia dan pelatihan khusus b) Keterbatasan fasilitas dan ruang kegiatan dan c) Kurangnya kolaborasi dengan lembaga eksternal. Saran penelitian yaitu seyogyanya Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas III Palu meningkatkan program pembinaan dengan metode resiliensi agar warga binaan mampu bangkit dari trauma dan pengalaman masa lalu, mewujudkan sistem pemasyarakatan yang berbasis pemulihan (restoratif), memenuhi hak asasi warga binaan Perempuan serta memberdayakan perempuan sebagai agen perubahan.

Kata Kunci: Pembinaan; Resiliensi; Warga Binaan

Abstract: The purpose of this research is to identify and analyze resilience methods for female inmates at the Class III Women's Penitentiary in Palu and to identify and analyze the obstacles faced by the Class III Women's Penitentiary in implementing resilience coaching for female inmates. The research method used empirical legal research utilizing primary and secondary data, which was then presented in the form of an inductive thinking pattern, moving from the specific to the general. The results found that the implementation of resilience coaching for female inmates at the Class III Women's Penitentiary in Palu aims to help inmates develop mental, emotional, and social resilience to face various challenges during their sentences. The obstacles faced by the Class III Women's Penitentiary in implementing resilience coaching for female inmates include: a) Limited human resources and specialized training; b) Limited facilities and activity space; and c) Lack of collaboration with external institutions. The research suggestion is that the Class III Palu Women's Correctional Institution should improve its guidance program with resilience methods so that inmates are able to recover from trauma and past experiences, realize a correctional system based on recovery (restorative), fulfill the human rights of female inmates and empower women as agents of change.

Keywords: Coaching; Resilience; Inmates

Received: 12 Aug, 2025

Revised: 30 Aug, 2025

Accepted: 10 Sept, 2025

Publish: 15 Sept, 2025

Publisher: Pusat Pengembangan Teknologi Informasi dan Jurnal, Universitas Muhammadiyah Palu

PENDAHULUAN

Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu unit pelaksana teknis dari jajaran Kementerian Pemasyarakatan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan. Salah satu fungsi Lembaga Pemasyarakatan adalah melaksanakan fungsi pembinaan yang merupakan proses sistem pemasyarakatan sebagai realisasi pembaharuan pidana yang dahulu dikenal penjara juga merupakan suatu proses pembinaan narapidana yang memandang narapidana sebagai makhluk Tuhan yang memiliki nilai-nilai agama dalam kehidupan, individu dan anggota Masyarakat.

Sebagaimana hasil observasi awal penulis di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas III Palu bahwa jumlah narapidana Perempuan pada tahun 2021 berjumlah 148 orang, tahun 2022 berjumlah 151 orang dan tahun 2023 berjumlah 161 orang. Dari peningkatan tersebut tentunya hal ini menjadi perhatian bagi Lembaga pemasyarakatan dan instansi lainnya terkait dengan peran Lembaga pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana Perempuan yang diharapkan tidak melakukan tindak pidana lagi setelah bebas dari masa tahanan.

Kegiatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan bukan sekedar untuk menghukum atau menjaga narapidana tetapi mencakup proses pembinaan agar warga binaan menyadari kesalahannya dan memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya.

Pada dasarnya seorang narapidana perempuan tidak jauh berbeda dengan narapidana laki-laki dalam melakukan tindak kriminalitas. Keduanya merupakan manusia biasa yang pasti melakukan kesalahan. Secara hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan yang berstatus sebagai narapidana juga sama. Kondisi psikologislah yang membedakan antara keduanya, seperti keadaan emosi, kesehatan mental, dan cara dalam menghadapi berbagai macam situasi.

Angka kejadian masalah kesehatan mental lebih banyak terjadi pada warga binaan Perempuan sebesar 60% dibandingkan dengan laki-laki sebesar 46,6% dari total 40% populasi penjara yang mengalami masalah kesehatan mental. Beberapa masalah Kesehatan mental yang sering terjadi pada WBP yaitu stres, cemas, perilaku agresif, dan psikosomatis. Dampak yang mungkin terjadi ketika WBP depresi yaitu berisiko untuk melakukan bunuh diri. Peningkatan angka kejadian masalah kesehatan mental pada WBP disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang memunculkan masalah psikologis seperti tekanan batin, pikiran negatif, perasaan bosan, hilangnya kemerdekaan, jenuh dengan rutinitas yang ada, kesendirian, rasa malu, dan rasa bersalah. Peningkatan angka kejadian masalah kesehatan mental pada WBP disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang memunculkan masalah psikologis seperti tekanan batin, pikiran negatif, perasaan bosan, hilangnya kemerdekaan, jenuh dengan rutinitas yang ada, kesendirian, rasa malu, dan rasa bersalah. Faktor eksternal yang dapat menyebabkan masalah Kesehatan mental datang dari lingkungan Lembaga pemasyarakatan (Lapas) yang melebihi kapasitas, penuh sesak, kurangnya privasi, kurangnya fasilitas dan perawatan kesehatan, serta terisolasi dari keluarga.

Seorang perempuan dengan predikat narapidana merupakan bukan hal yang mudah untuk diterima, hal ini dikarenakan seseorang dengan predikat sebagai narapidana sangat mungkin mengalami pengalaman yang tidak menguntungkan dan tidak menyenangkan sehingga membuat mereka mengalami tekanan secara fisik maupun psikologis seperti takut, sedih, sulit tidur, sulit makan dan minum. Tekanan tersebut tidak hanya dialami ketika berada didalam rumah tahanan namun juga dialami ketika sudah berada diluar Rumah Tahanan sehingga hal tersebut mengakibatkan kesiapan untuk kembali ke masyarakat menjadi persoalan sendiri. Label sebagai mantan narapidana membuat mereka tidak mudah diterima. Untuk menghadapi situasi seperti itu, diperlukan kemampuan yang oleh ilmuwan psikologi disebut dengan resiliensi.

Resiliensi berkaitan dengan masalah kesehatan mental. Resiliensi merupakan kemampuan untuk bertahan atau kembali normal dari keadaan yang sulit, dan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Resiliensi dapat mengatasi masalah psikososial individu dengan meningkatkan toleransi stress dan fungsi positif. Resiliensi pada individu dapat ditingkatkan dengan memberikan dukungan sosial, optimisme dan harapan.

Resiliensi merupakan kapasitas yang tidak hanya ada pada semua orang, tetapi juga merupakan kapasitas yang ada pada kelompok atau masyarakat. Kapasitas inilah yang memungkinkan setiap individu, kelompok ataupun komunitas memiliki kemampuan mengantisipasi, meminimalkan atau mengatasi pengaruh yang bisa merusak pada

saat mereka mengalami musibah. Resiliensi merupakan proses yang dinamis dalam diri individu yang dapat diukur berdasarkan taraf tinggi dan rendah.

Resiliensi dipandang sebagai suatu kapasitas individu yang berkembang melalui proses belajar. Melalui berbagai keberhasilan dan kegagalan dalam menghadapi situasi-situasi sulit, individu terus belajar memperkuat diri sehingga mampu mengubah kondisi-kondisi yang menekan dan tidak menyenangkan menjadi suatu kondisi yang wajar untuk diatasi. Oleh karena itu, resiliensi individu perlu dikembangkan. Pengembangan kemampuan dan keterampilan resiliensi sangat bermanfaat sebagai bekal dalam menghadapi situasi-situasi sulit yang tidak dapat dihindarkan.

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan karunia Allah yang sudah dijamin sejak lahir, warga binaan perempuan juga dijamin hak-haknya selama menjalani hukuman, seperti mendapatkan pembinaan dan pendidikan. Salah satu pembinaan dengan rehabilitasi konseling dengan tujuan untuk hidup tenang, normal dan nyaman selama menjalani hukuman dan setelah bebas. Permasalahan WBP selama menjalani hukuman lemahnya konsep diri, depresi dan tertekan, merasa bersalah dan kecemasan setelah bebas dan labeling masyarakat. semua permasalahan terjadi karena WBP tidak memiliki resiliensi diri yang baik. Resiliensi sangat penting agar mampu bangkit dan pulih ketika fakta tidak sesuai dengan harapan.

Adanya model pembinaan dan Pendidikan resiliensi bagi warga binaan Pemasarakatan tidak terlepas dari sebuah dinamika, yang bertujuan untuk lebih banyak memberikan bekal bagi Narapidana dalam menyongsong kehidupan setelah selesai menjalani masa hukuman (bebas). Tentang lahirnya istilah Lembaga Pemasarakatan dipilih sesuai dengan visi dan misi lembaga itu untuk menyiapkan para narapidana kembali ke masyarakat. Pemasarakatan dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan antara Warga Binaan Pemasarakatan dengan masyarakat. Selanjutnya pembinaan diharapkan agar mereka mampu memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya. Kegiatan di dalam LP bukan sekedar untuk menghuku atau menjaga narapidana tetapi mencakup proses pembinaan agar warga binaan menyadari kesalahan dan memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan.

METODE

Adapun tipe penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan dan mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, Undang-Undang atau kontrak) secara in action/in abstracto pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat (in concreto).

Pengkajian dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Pendekatan ini tidak semata-mata bertujuan mengungkapkan kebenaran saja, tetapi juga memahami kebenaran tersebut.

HASIL DAN DISKUSI

Pelaksanaan Pembinaan Melalui Metode Resiliensi Pada Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Palu

Pelaksanaan pemidanaan di pada Lembaga Pemasarakatan selain untuk menegakkan hukum, juga ditekankan pada resosialisasi agar warga binaan pemasarakatan berhasil berintegrasi dengan lingkungan masyarakat yang bertujuan agar warga binaan pemasarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam Pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Ibu Nisrina, SH selaku pengelola Pembinaan Kepribadian Lembaga Pemasarakat Perempuan Kelas III Palu yang menjelaskan bahwa:

Lembaga Pemasarakatan bukan tempat untuk pembalasan dendam para narapidana yang telah melakukan kesalahan. Dalam Lembaga Pemasarakatan, warga binaan pemasarakatan juga mendapat

pembinaan yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan dan kerohanian.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai sebuah badan yang berdiri di bawah naungan Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum & HAM, memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan pembinaan serta pelaksanaan hukuman terhadap para narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang ada di dalamnya. Terseret nya seseorang ke dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya sekedar pembalasan saja, tetapi agar tercapainya kesejahteraan masyarakat disertai perbaikan pelaku tindak pidana, lebih memperlihatkan adanya perbaikan perlakuan terhadap para narapidana yang menjalani hukuman ke arah yang lebih manusiawi.

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan karunia Allah yang sudah dijamin sejak lahir, narapidana juga dijamin hak-haknya selama menjalani hukuman, seperti mendapatkan pembinaan dan pendidikan. Salah satu pembinaan dengan rehabilitasi konselling dengan tujuan untuk hidup tenang, normal dan nyaman selama menjalani hukuman dan setelah bebas. Permasalahan narapidana selama menjalani hukuman lemahnya konsep diri, depresi dan tertekan, merasa bersalah dan kecemasan setelah bebas dan labeling masyarakat. semua permasalahan terjadi karena narapidana tidak memiliki resiliensi diri yang baik. Resiliensi sangat penting agar mampu bangkit dan pulih Ketika fakta tidak sesuai dengan harapan. Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Effendy, SH selaku Kasubsi Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan kelas III Palu yang menjelaskan bahwa:

Pelaksanaan pembinaan melalui metode resiliensi pada narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan kelas III Palu bertujuan untuk membantu narapidana dalam mengembangkan ketahanan mental, emosional, dan sosial dalam menghadapi berbagai tantangan selama masa hukuman mereka. Metode resiliensi berfokus pada penguatan kemampuan individu untuk bangkit kembali dari kesulitan, stres, dan trauma, serta membangun keterampilan untuk beradaptasi dengan kondisi yang sulit.

Pelaksanaan pembinaan melalui metode resiliensi pada narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan perempuan dilakukan beberapa aspek penting dalam pelaksanaan pembinaan melalui metode resiliensi pada narapidana Perempuan, yaitu:

Pengenalan Konsep Resiliensi

Pendidikan dan Pelatihan: Narapidana diperkenalkan dengan konsep resiliensi, yang meliputi kemampuan untuk menghadapi kesulitan dengan sikap yang positif, serta cara-cara untuk mengatasi stres dan trauma.

Keterampilan Mengelola Emosi: Program pelatihan ini mengajarkan bagaimana cara untuk mengenali dan mengelola emosi, serta cara menghadapi rasa cemas, kesedihan, atau frustrasi yang mungkin timbul di lingkungan penjara.

Pemberdayaan Psikologis dan Sosial

Pendampingan Psikologis: Narapidana perempuan diberikan akses ke sesi konseling psikologis untuk membantu mereka mengatasi trauma masa lalu, termasuk kekerasan atau pelecehan yang mungkin mereka alami sebelum atau selama masa hukuman.

Kelompok Dukungan: Program kelompok yang melibatkan diskusi dan berbagi pengalaman dapat memperkuat rasa kebersamaan dan memberikan dukungan sosial antar narapidana.

Pengembangan Keterampilan Hidup (Life Skills)

Keterampilan Sosial dan Komunikasi: Melalui berbagai aktivitas, narapidana dilatih untuk mengembangkan keterampilan komunikasi yang baik, membangun hubungan sosial yang sehat, dan meningkatkan kemampuan untuk bekerja dalam tim.

Pendidikan dan Pelatihan Kerja: Menyediakan pelatihan keterampilan teknis atau keterampilan lain yang dapat membantu narapidana perempuan untuk memperoleh pekerjaan setelah dibebaskan, seperti menjahit, memasak, atau keterampilan lainnya.

Program Penguatan Spiritual

Lembaga pemasyarakatan juga mengintegrasikan pendekatan spiritual sebagai bagian dari pembinaan resiliensi. Ini dapat membantu narapidana menemukan makna dan ketenangan dalam kehidupan mereka, serta memberikan dukungan moral yang dapat memperkuat ketahanan mereka.

Peningkatan Hubungan dengan Keluarga

Program Kunjungan dan Komunikasi dapat memberikan kesempatan bagi narapidana untuk berkomunikasi dan mengunjungi keluarga mereka dapat memperkuat ikatan keluarga dan memberikan dukungan emosional yang penting untuk ketahanan mereka.

Berdasarkan uraian tersebut di atas bahwa dengan mengimplementasikan metode resiliensi, Lapas Perempuan dapat menciptakan lingkungan yang mendukung perubahan positif bagi narapidana perempuan. Pendekatan ini berfokus pada pemberdayaan diri mereka, dengan harapan dapat mengurangi angka residivisme dan membantu narapidana untuk lebih siap menghadapi tantangan kehidupan setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan.

Secara umum program pembinaan di Lembaga pemasyarakatan dilakukan dalam 3 tahap, yaitu tahap awal, tahap lanjutan dan tahap akhir. Pada tahap awal, narapidana menjalani masa pengenalan terhadap lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. Pada tahap lanjutan, narapidana diberikan program pembinaan kepribadian dan kemandirian. Tahap akhir, dilaksanakan Ketika narapidana menjalani masa-masa akhir hukuman, pada tahap ini Lembaga Pemasyarakatan bekerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Effendy, SH selaku Kasubsi Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan kelas III Palu yang menjelaskan bahwa:

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Palu ada beberapa program pembinaan yang dilakukan yaitu Program Pembinaan keagamaan berupa pengajian, ceramah dan bedah Al- Quran, lalu Program Kebangsaan dan Bernegara yang meliputi upacara maupun peringatan hari besar lainnya, lalu Program Jasmani dan Rohani yang meliputi kegiatan olahraga, kemudian Program Pendidikan yang meliputi pembinaan untuk narapidana yang buta huruf Al-Quran dan pembinaan untuk narapidana yang tidak bisa membaca.

Walaupun banyaknya program yang dijalankan, tetapi kehidupan di penjara bukanlah sesuatu yang menyenangkan. Narapidana harus melakukan penyesuaian diri dengan kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan dimulai saat ia pertama kali memasuki Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana yang baru masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Palu tersebut harus ditempatkan terlebih dahulu ke dalam ruangan khusus narapidana baru yang disebut dengan ruangan mapenaling (masa pengenalan lingkungan), yang tujuannya agar narapidana tersebut dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya.

Selama menjalani kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan, Narapidana dihadapkan pada rutinitas yang sama setiap harinya. Keadaan seperti ini dapat menjadi stressor yang menyebabkan stres pada narapidana. Terlebih jika narapidana tersebut merupakan narapidana dengan kasus tindak pidana berat seperti pembunuhan, narkoba, tipikor di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Palu. Narapidana perempuan dengan kasus berat tersebut rata-rata berasal dari keluarga dengan perekonomian menengah ke atas. Kehidupan yang mereka jalani sebelum masuk di Lembaga Pemasyarakatan tentu berbeda dengan kehidupan yang mereka jalani setelah masuk di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Palu Kehidupan yang biasa mereka jalani dengan berkecukupan berubah menjadi kehidupan yang penuh keterbatasan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan. Hal inilah yang dapat memicu timbulnya stres di dalam diri narapidana perempuan tersebut.

Namun, kesulitan yang dihadapi oleh narapidana Perempuan tidak selamanya direspon secara negatif. Kesulitan tersebut mampu menyesuaikan dirinya terhadap kondisi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Palu dengan menampilkan perilaku-perilaku positif selama menjalani masa hukumannya. Perilaku positif seperti mentaati peraturan, menyelesaikan tanggung jawabnya sehari-hari, menjalin hubungan yang akrab dengan narapidana lain, mengisi masa hukumannya dengan kegiatan atau aktivitas yang produktif dan perilaku-perilaku positif lainnya.

Kemampuan narapidana untuk memberikan respon positif terhadap kesulitan dan permasalahan yang dihadapinya tidak akan terlepas dari kondisi lingkungan Lembaga Pemasyarakatan dengan memberikan pembinaan metode resiliensi serta dukungan keluarga dan yang tidak kalah penting adalah karakteristik pribadi dari narapidana Perempuan itu sendiri.

Kendala-Kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Palu dalam Pelaksanaan Pembinaan Metode Resiliensi pada Warga Binaan Perempuan

Wargabinaan perempuan yang resilien akan memiliki kemampuan dalam mengendalikan emosi, berempati terhadap orang lain, membina hubungan baik terhadap orang lain, dan mampu memotivasi diri sendiri. Kemampuan tersebut disebut dengan kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi yang dimiliki WBP perempuan dapat meningkatkan adaptasi, kemampuan dalam menghadapi tantangan, dan mempertahankan semangat hidup. Kecerdasan emosi sangat berhubungan dengan resiliensi, sehingga dapat dikatakan bahwa WBP perempuan yang memiliki kecerdasan emosi tinggi maka tinggi juga resiliensi yang dimiliki oleh WBP perempuan tersebut.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas III Palu menghadapi sejumlah kendala dalam pelaksanaan pembinaan menggunakan metode resiliensi bagi warga binaan perempuan. Meskipun telah melaksanakan berbagai program seperti pelatihan keterampilan dan asesmen awal, tantangan tetap ada. Sebagaimana hasil penelitian penulis Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas III Palu, penulis uraikan sebagai berikut:

Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Pelatihan Khusus

Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pelatihan Khusus di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), khususnya dalam konteks pembinaan metode resiliensi pada warga binaan, merupakan salah satu kendala utama yang berdampak langsung pada efektivitas program pembinaan. Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Effendy, SH selaku Kasubsi Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan kelas III Palu yang menjelaskan bahwa:

Jumlah petugas pembinaan yang terbatas dan kurangnya pelatihan khusus dalam metode resiliensi dapat menghambat efektivitas program. Kemudian petugas pembinaan umumnya lebih fokus pada aspek administratif atau keamanan, bukan pemulihan psikologis.

Dari uraian tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa petugas perlu memiliki keterampilan khusus untuk memahami dan mendukung proses pemulihan psikologis warga binaan Perempuan. Banyak Lapas belum memiliki tenaga ahli yang kompeten dalam bidang psikologi atau terapi resiliensi. Kemudian rasio antara petugas dan jumlah warga binaan sering kali tidak seimbang, membuat petugas kewalahan. Hal ini menyebabkan program pembinaan psikologis seperti resiliensi sulit dilaksanakan secara individual dan menyeluruh.

Keterbatasan Fasilitas dan Ruang Kegiatan

Fasilitas yang terbatas dapat membatasi pelaksanaan kegiatan pembinaan yang memadai di Lembaga pemasyarakatan perempuan. Ruang yang cukup dan fasilitas yang mendukung sangat penting untuk kegiatan yang berfokus pada peningkatan ketahanan mental dan emosional. Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu dr. Olvianne Soraya Santi selaku Dokter pada Poliklinik Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan kelas III Palu yang menjelaskan bahwa:

Keterbatasan fasilitas dan ruang kegiatan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan menjadi kendala signifikan dalam pelaksanaan pembinaan, khususnya yang berfokus pada pengembangan resiliensi warga binaan.

Tidak semua Lapas memiliki ruang konsultasi, ruang tenang, atau fasilitas khusus untuk pembinaan psikologis yang mendukung efektifnya program pembinaan kesehatan mental. Secara umum masih banyak Lapas Perempuan yang belum memiliki fasilitas pendukung kegiatan psikososial seperti ruang refleksi/meditasi, peralatan untuk pelatihan mental dan sarana edukasi seperti modul, buku panduan, alat visual, atau perangkat digital.

Sebagian besar warga binaan perempuan memiliki trauma masa lalu (kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan, kemiskinan). Sehingga faktor inilah membuat proses pembinaan butuh pendekatan yang sangat hati-

hati dan jangka panjang. Dengan keterbatasan ini, penting bagi pemerintah dan stakeholder terkait untuk mendorong peningkatan fasilitas Lapas perempuan, khususnya yang menunjang pembinaan psikologis dan resiliensi.

Kurangnya Kolaborasi dengan Lembaga Eksternal

Kurangnya kolaborasi dengan lembaga eksternal merupakan salah satu tantangan besar yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan dalam upaya mendukung pembinaan resiliensi bagi warga binaan. Kolaborasi ini sangat penting karena Lapas tidak bisa bekerja sendiri dalam membangun ketahanan mental dan emosional para warga binaannya. Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Nisrina, SH selaku pengelola Pembinaan Kepribadian Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Palu yang menjelaskan bahwa:

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan sudah memiliki jaringan kerja dengan lembaga-lembaga eksternal seperti LSM, perguruan tinggi tetapi belum dengan lembaga psikologi dalam mendukung pelaksanaan pembinaan metode resiliensi pada warga binaan perempuan.

Kolaborasi dengan lembaga eksternal seperti lembaga psikologi, organisasi masyarakat, atau institusi pendidikan dapat memperkaya program pembinaan. Namun, kurangnya kerjasama ini dapat membatasi keberagaman pendekatan dan sumber daya yang tersedia.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, penting bagi Lapas Perempuan Kelas III Palu untuk meningkatkan pelatihan bagi petugas, memperluas fasilitas, membangun kemitraan dengan lembaga eksternal, dan memastikan dukungan psikologis yang berkelanjutan bagi warga binaan Perempuan.

Pembinaan dengan metode resiliensi warga binaan dapat dikategorikan sebagai bagian dari pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya hak untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi, pendidikan, serta pengembangan diri meskipun sedang menjalani pidana. Berikut penulis uraikan point penting yang harus diperhatikan terkait hak asasi manusia warga binaan:

Hak untuk Diperlakukan Secara Manusiawi

Dalam Pasal 28G Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, termasuk hak atas perlakuan yang manusiawi. Jadi, pembinaan resiliensi adalah bentuk penghargaan atas martabat warga binaan sebagai manusia yang berhak tumbuh, pulih, dan bangkit dari trauma.

Hak atas Pendidikan dan Pengembangan diri

Warga binaan memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan, termasuk pendidikan nonformal seperti pembinaan mental dan psikososial. Program resiliensi termasuk ke dalam pengembangan kapasitas diri, yang penting untuk proses reintegrasi sosial setelah bebas dari Lembaga pemasyarakatan Perempuan.

Hak atas Kesehatan Mental

Kesehatan mental adalah bagian dari hak atas kesehatan secara menyeluruh. Pembinaan resiliensi mendukung kesehatan mental warga binaan, membantu mereka mengatasi tekanan, trauma, dan stres akibat masa lalu atau kondisi selama di dalam Lembaga pemasyarakatan Perempuan.

Dari uraian tersebut penulis menyimpulkan bahwa Lembaga pemasyarakatan Perempuan bukan hanya tempat hukuman, tetapi juga lembaga rehabilitasi dan pembinaan. Dengan membangun resiliensi, warga binaan dibekali kemampuan untuk beradaptasi, mengatasi hambatan hidup, dan menjadi individu yang produktif kembali di masyarakat serta menjadi bagian dari hak untuk kembali hidup bermartabat. Menyiapkan dan melaksanakan pembinaan resiliensi bukan hanya kegiatan sosial, tapi kewajiban negara dalam menjamin hak asasi setiap individu, termasuk mereka yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan.

KESIMPULAN

Pelaksanaan pembinaan melalui metode resiliensi pada narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan kelas III Palu bertujuan untuk membantu narapidana dalam mengembangkan

ketahanan mental, emosional, dan sosial dalam menghadapi berbagai tantangan selama masa hukuman warga binaan. Metode resiliensi berfokus pada penguatan kemampuan individu untuk bangkit kembali dari kesulitan, stres, dan trauma, serta membangun keterampilan untuk beradaptasi dengan kondisi yang sulit. Pembinaan dengan metode resiliensi warga binaan dapat dikategorikan sebagai bagian dari pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya hak untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi, pendidikan, serta pengembangan diri meskipun sedang menjalani pidana.

Kendala-Kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Palu dalam pelaksanaan pembinaan metode resiliensi pada warga binaan perempuan, yaitu: a) Keterbatasan sumber daya manusia dan pelatihan khusus b) Keterbatasan fasilitas dan ruang kegiatan dan c) Kurangnya kolaborasi dengan lembaga eksternal.

SARAN

Seyogyanya Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas III Palu meningkatkan program pembinaan dengan metode resiliensi agar warga binaan mampu bangkit dari trauma dan pengalaman masa lalu, mewujudkan sistem pemasyarakatan yang berbasis pemulihan (restoratif), memenuhi hak asasi warga binaan Perempuan serta memberdayakan perempuan sebagai agen perubahan.

Seyogyanya Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas II Palu meningkatkan sarana dan fasilitas pendukung kegiatan psikososial seperti ruang refleksi/meditasi, peralatan untuk pelatihan mental serta sarana edukasi seperti modul, buku panduan, alat visual, atau perangkat digital yang mendukung efektifnya program pembinaan kesehatan mental.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhamad, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- M.F.N. Dewata dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Cetakan I, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014
- Sayekti Dwi Cahyani dan Megah Andrian, Resiliensi Warga Binaan Pemasyarakatan Perempuan : Journal of Nursing and Health Sciences, Volume 1, No 1, 2020
- Wahyu Rizaldi dan Mohd. Din, "Tindakan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Pelaku Tindak Pidana Berlatar Belakang Aliran Sesat", Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Syiah Kuala, Vol.2 No.3, Agustus 2018